

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arba, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arisaputra, Ilham, 2015, *Reforma Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ashhofa, Burhan, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chulaemi, Achmad, 1992, *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, FH. Undip, Semarang.
- Harono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2000, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Moedjiono, 1992, *Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta.
- Moelong, Lexy J., 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mukti, Affian, 2006, *Pokok-Pokok Bahasan Hukum Agraria*. USUPress, Medan.
- Nasoetion, Lutfi Ibrahim, 2002, *Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 Tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Parlindungan, A.P., 1991, *Landreform Di Indonesia Strategi Dan Sasarannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Parlindungan, A.P., 1993, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Ruchyat, Edy, 2007, *Politik Pertanahan Nasional Sampai orde Reformasi*, Alumni, Bandung.
- Saleh, Wantjik, 1997, *Hak Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salindeho, John, 1998, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia, Jakarta.
- Santoso, Urip 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia, Jakarta.
- Siahaan, Pahala, 2003, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sidharta, Arief Bernard, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Pondasi Kefalsafahan dan Sifat Keilmuan ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal, Asikin dan Aminuddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1934.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian, yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nnomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433.

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 Nomor Sekra 9/1/12 Instruksi Bersama Menteri Dalam negeri Dan Otonomi Daerah Dengan menteri Agraria nomor Sekra 9/1/2 tanggal 5-1-1961 tentang pelaksanaan perpu nomor 56/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.

Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah, yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian ganti Kerugian yang telah dituangkan dalam Lembaran-Negara Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1966 tentang Penunjukan badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dans Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

Penelitian

Tardi Juniarto, 2003, *Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Kabupaten tegal*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Muhammad, Nurman A.S, 2010, *Analisis Hukum Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Tanah-Tanah Terlantar Studi Kasus Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*, Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Suryani, Luh Putu, 2011, *Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Tanah Di Kota Denpasar*, Tesis Universitas Udayana, Bali.

Internet

Badan Pusat Statistik Tahun 2017, *Luas Lahan Sawah Indonesia 8 Juta Hektar*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/04/10/2016-luas-lahan-sawah-indonesia-8-juta-hektar>, diakses pada 1 November 2018

Dr. I Ketut Sariyasa, *Dominasi Sektor Pertanian Di Indonesia*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/intan/17/04/06/onyups280-dominasi-sektor-pertanian-di-indonesia>, diakses pada 1 November 2018

Cantika Adinda Putri Noveria, *Sertifikasi tanah dan lahan terlantar masih jadi persoalan*, <https://www.alinea.id/bisnis/sertifikasi-tanah-dan-lahan-terlantar-masih-jadi-persoalan-b1Uwd9PC>, diakses pada 1 november 2018

Finance.Detik.com, *Menhut lahan terlantar capai 12 juta hektar*, <http://finance.detik.com/read/2011/03/24/120758/1600260/4/menhut-lahan-terlantar-capai-12-juta-hektar>, diakses pada 1 November 2018

Lain-Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kamus Besar Bahasa Inggris

BPS Kabupaten Batang, 2018, *Kecamatan Reban dalam Angka*, BPS Kabupaten Batang, Batang,